

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Rawamangun: Sinar Grafika
- Amir, Chaerul. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Anonim. 1992. *Arbitration Procedures. U.S: Securities and Exchange Commission*
- Arto, Mukti. 2012. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuris, dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Attamimi, A. Hamid. “Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum tata Negara)”, dalam Ahmad Redi, eds. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana
- Djalil, Basiq. 2019. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi, Fifit Fitri. 2016. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

- Hasbi dan Nurul Huda. 2017. *Referensi Arbitrase Syariah Indonesia*. Jakarta: La Tansa Mashiro Publisher
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. 2019. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media
- Indrati , Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang- Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. E-Book: PT. Kanisius
- Kelsen, Hans. "General Theory of Law and State," dalam Maria Farida, eds. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Manan, Abdul. 2019. *Pengadilan Agama (Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI)*. Jakarta: Kencana
- Muda, Ahmaad A.K. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. N.p.: Realty Publisher
- Muhammad, Abdulkadir. "Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia," dalam Yuhelson, eds. 2018. *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran
- Mustafa, Pinton Setya, Hafidz Gusdiyanto, Andif Victoria, Ndaru Kukuh Masgumelar, Nurika Dyah Lestariningsih, Hanik Maslacha, Dedi Ardiyanto, Hendra Arya Hutama, Matheos Jerison Boru, Iwan Fachrurozi, Estrado Isaci S.R., Taufan Bayu Prasetyo, Syaiful Ramadhana. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan*

Kelas Dalam Pendidikan Olahraga. Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Nawiasky, Hans. "Allgemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegriffe,"
dalam Maria Farida, eds. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis,
Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius

Salle. 2018. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social
Politic Genius

Sangadji, Z.A.. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok:
Rajawali Pers

Subekti, R.. Arbitrase Perdagangan, dalam Yuhelson. 2018. *Hukum Arbitrase*.
Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan
Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam
Teori dan Praktik*. Depok. Prenadamedia: Group

Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti

Tim Dosen STISNU Nusantara. 2018. *Modul Mata Kuliah Arbitrase
Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: PSP Nusantara Press

Wiratmanto. 2017. *Buku ajar: Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*.

Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yuhelson. 2018. *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta. CV: Arti Bumi Intaran

Zaidah, Yusna. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia*. Banjarmasin: IAIN Antasari
Press

B. Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edar Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edar Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Karya Tulis Ilmiah

- Angkasa, Nawa. 2013. "Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Nizham* 2, no. 1.
- Arifin, Zainal. 2006. "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Himmah* 7, no. 18.
- Entriani, Anik. 2017. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum.Indonesia." *An-Nisbah*, 3, no. 2.
- Firdawaty, Linda. 2011. "Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *Al-'Adalah*, 10, no. 2.
- Habibi. 2019. "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah." *Studi Multidisipliner*, 6, no. 1.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, no. 3.
- Maksum, Hairul. 2020. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)." *Juridica*, 2, no. 1.
- Manan, Bagir. "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober

1994)”, dalam Sony Maulana Sikumbang, dkk. "Modul 1: Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan"

———. . Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik, dalam Nurfaqih Irfani. 2020. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3.

Maravall, Jose Maria and Adam Przeworski (eds.). *Democracy and The Rule of Law*, dalam Nawa Angkasa. 2013. “Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Nizham* 2, no. 1.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. dalam Soegiyono. “Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesi.*, dalam Nawa Angkasa. 2013. “Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Nizham* 2, no. 1.

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, dalam Bambang Heriyanto. 2018. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah,” *Jurnal Pakuan Law Review* 4, no. 1.

- Situmorang, Mosgan. 2017. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, no. 4.
- Soegiyoni. N.d.. "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*. Jakarta
- Subekti, R. dan R. Tjiteosoedibio. *Kamus Hukum*, dalam Nawa Angkasa. 2013. "Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Nizham* 2, no. 1.
- Sumiarni, Endang. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, dalam Soegiyono. "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*
- Tampongangoy, Grace Henni. 2015. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Lex et Societatis*, 3, no. 1.
- Vlies, I.C. van der. *Handboek Wetgeving*, trans. Linus Doludjawa, dalam Nurfaqih Irfani. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknann, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2016. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Pasca Reformasi." *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, no. 2.
- Widayanti. 2020. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan", *Jurnal Hukum Unissula*, 36, no. 2.

- Widowaty, Yeni dan Fadia Firtiyanti. 2014. “Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Bani Dan Basyarnas”. Laporan Akhir Penelitian Unggulan Prodi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Wulandari, Friska Muthi. 2017. “Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. Tesis diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga ,Yogyakarta
- Yuliandri. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, dalam Widayati. 2020. “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan,” *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2.

D. Internet

- Anonim. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: BPK Republik Indonesia, 2018. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf> (19 Januari 2022)
- Anonim. *Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama*. Magetan: Peradilan Agama Magetan, 2019. <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama> (30 Maret 2021)
- Aziz, M. Faiz. *Arbitrase Syariah dan Lembaga Peradilan*. N.p.:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2016. <https://pshk.or.id/blog-id/arbitrase-syariah-dan-lembaga-peradilan/> (16 Maret 2021)

- DPR RI. *Profil UU: Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. Jakarta: DPR RI, 2016. [dhttps://www.dpr.go.id/jdih/index/id/8](https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/8) (20 November 2021)
- Hidayat, M. Yeri dan Zuhurul Anam. *Prosedur Eksekusi Putusan Basyarnas, Hak Tanggungan Dan Putusan Pengadilan Agama Yang Simetris*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/prosedur-eksekusi-putusan-basyarnas-hak-tanggungan-dan-putusan-pengadilan-agama-yang-simetris-oleh-m-yeri-hidayat-s-h-dan-zuhurul-anam-s-h-i-27-8> (25 November 2021)
- Kadir, Andi dan Bernard Sihombing, *Arbitration Procedures And Practice In Indonesia*. Canada: Thomson Reuters, 2021. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-520-8397?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-520-8397?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)) (29 Maret 2021)
- Mahkamah Agung RI. *Tugas Pokok dan Fungsi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> (15 November 2021)
- Naoval, Erlan. *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Era Reformasi*. Medan: PA Medan, 2010. <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/hasil-penelitian/artikel-anda/844-kedudukan-dan-kewenangan-peradilan-agama-di-era-reformasi> (23 November 2021)
- Pengadilan Agama Sumedang. *Kedudukan, Tugas, dan Wewenang*. Sumedang: PA Sumedang, 2019. <http://www.pa-sumedang.go.id/en/profil-pengadilan/kedudukan-tugas-dan-wewenang> (20 November 2021)

Pengadilan Agama Unaaha. *Sejarah Pengadilan Agama Unaaha*, Unaaha:

Pengadilan Agama Unaaha, <https://www.pa-unaaha.go.id/profil-dasar/sejarah/46> (23 November 202)

Sasole, Djabir. *Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Pengangkatan Anak*. Ternate: PA

Ternate, 2019. <http://www.pa-ternate.go.id/2019/07/05/ekonomi-syariah>
(16 Maret 2021)